



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2024**





WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **113** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1453



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat yang dicurahkan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025. Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 yang merupakan bagian dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dokumen perencanaan daerah yang memiliki periode 1 (satu) tahun anggaran dan merupakan penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Tahun Anggaran 2025.

Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 mempunyai nilai yang cukup strategis sebagai wujud nyata pembangunan di bidang Perikanan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja ini.

Batam, Juli 2024
Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam



YUDI ADMAJIANTO, SSTP
NIP. 19810929 199912 1 001



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-1
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam	II-25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD	II-29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-43

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	III-2
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... IV-1

BAB V PENUTUP V-1





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024	II-24
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Batam	II-28
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan RKPD	II-34
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	II-42
Tabel 3.1	Program Prioritas KKP	III-2
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perikanan Kota Batam	III-3
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	III-8
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025	IV-10





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsive sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja, setelah penyusunan Rancangan Renja selanjutnya penyusunan Rancangan Akhir Renja. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rankhir Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan Akhir Renja PD Dinas Perikanan Kota Batam merupakan dokumen perencanaan kerja Dinas Perikanan selama 1 (satu) tahun anggaran. Rancangan Akhir Renja ini merupakan penjabaran dari beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Tahun Anggaran 2025. Dalam proses penyusunannya didasarkan atas sinkronisasi keterpaduan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam dengan usulan rencana *Bottom Up* dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota, Reses DPRD dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam tahun 2021-2026.



Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 ini disusun memuat dan evaluasi evaluasi program dan kegiatan tahun berjalan 2024 serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan ini merupakan bagian dari tugas pokok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yaitu perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Rancangan Akhir Renja PD Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam Perencanaan Pembangunan Perikanan Kota Batam secara prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - k. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - m. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1567);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Batam No. 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Batam No. 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
- t. Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026;
- v. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864)
- w. Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 dimaksudkan untuk mengetahui penjabaran perencanaan pembangunan bidang Perikanan Kota Batam selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD. Adapun penjabaran perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 meliputi :

- 1. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025.



2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025.
3. Indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025.
4. Kelompok sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025.
5. Pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun Anggaran 2025.

Secara umum tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang diaplikasikan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan OPD dengan sasaran yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan khusus dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 adalah :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2025.
2. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Tahun 2025.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan Untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Perikanan terkait dengan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review dilaksanakan berdasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA - Perangkat Daerah (dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Pada tahun 2024 Renja Dinas Perikanan Kota Batam disusun diselaraskan dengan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 dan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 yang memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dan tahun berjalan 2024, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Perikanan Kota Batam telah melaksanakan sejumlah kegiatan melalui program yang ada. Tahun Anggaran 2023 Dinas Perikanan Kota Batam mendapat alokasi dana sebesar Rp 18.405.493.529,- (delapan belas milyar empat ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan serapan anggaran sebesar Rp. 16.486.260.820,- (enam belas milyar empat



ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau 89,57%).

Adapun rincian dari realisasi fisik dan anggaran Tahun 2023 yang mengacu kepada laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.610.283.559,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.221.834.740,- (96,65%). Sedangkan indicator output kegiatan adalah Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.439.444.309,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.225.889.112,- (97,74%). Sedangkan indicator output kegiatan adalah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 9.394.004.309,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.180.449.112,- (97,73%). Sedangkan indicator output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebanyak 62 orang/bulan dan terrealisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 45.440.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.440.000,- (100%). Sedangkan indicator output sub kegiatan adalah Jumlah



Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target sebanyak 12 dokumen dan terrealisasi sebesar 100%.

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 279.268.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 246.338.320,- (88,21%). Sedangkan indicator output output kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar 100% dan terrealisasi sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 116.004.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 102.489.400,- (88,35%). Sedangkan indicator output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan dengan target 3 paket dan terrealisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 17.120.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.580.501,- (91,01%). Sedangkan indicator output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 paket dan terrealisasi sebesar 100%.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.404.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.898.500,- (78,97%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan terrealisasi sebesar 100%.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.246.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.378.000,- (77,35%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 2 paket dan terrealisasi sebesar 100%.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 135.494.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.991.919,- (88,56%). dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggara-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan terrealisasi sebesar 100%.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.515.913.100,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.388.782.908,- (91,61%) dengan output kegiatan Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 100% dan perkiraan terealisasi sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 185.905.500,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.924.580,- (79,57%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.330.007.600,- dengan



realisasi keuangan sebesar Rp. 1.240.858.328,- (93,30%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 113.485.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.050.000,- (94,33%) dengan output kegiatan Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 100% dan terrealisasi sebesar 100%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Meubel berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 36.550.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.950.000,- (98,36%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 3 paket dan terrealisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 76.935.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.100.000,- (92,42%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 7 unit dan terrealisasi sebesar 100%.

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 262.172.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 253.774.400,- (96,80%) dengan output kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan



Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 184.080.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.972.400,- (96,68%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya dengan target terpeliharanya 12 unit kendaraan dinas atau operasional lapangan dan terrealisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.670.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.332.000,- (91,46%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 23 unit peralatan /mesin dan terrealisasi sebesar 100%.

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gadung Kantor dan Bangunana Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gadung Kantor dan Bangunana Lainnya berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 62.422.400,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.470.000,- (98,47%) dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi dengan target 2 unit peralatan /mesin dan terrealisasi sebesar 100%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp.



4.178.863.060,- dengan indicator outcome jumlah produksi nelayan kecil dengan target 20.559 ton dan terrealisasi sebesar 24.127 ton (100%). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 4.178.863.060,- dengan indicator output Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 kelompok. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil berupa masukan input dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.178.863.060,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.227.750.200,- (77,24%) dengan indicator output sub kegiatan adalah Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya dengan target 2.004 nelayan dan terrealisasi sebesar 2.171 nelayan atau 100%. Bentuk pengembangan kapasitas yang diberikan kepada nelayan kecil tersebut berupa pemberian bantuan asuransi nelayan kepada 1.944 orang nelayan kecil dan bantuan sarana perikanan tangkap kepada 60 orang nelayan kecil. Bantuan asuransi telah diserahkan kepada 2.301 orang nelayan, sementara bantuan sarana perikanan tangkap diserahkan 327 orang nelayan kecil. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dilaksanakan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil di Kota Batam, sehingga pelaksanaan sub kegiatan tersebut sangat penting untuk dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 705.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 678.875.000,- (96,21%) dengan indicator outcome jumlah produksi pembudidaya ikan dengan target 7.678 ton dan telah terrealisasi sebanyak 10.044 ton (100%) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan



Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 705.650.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 678.875.000,- (96,21%) dengan output kegiatan Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP dengan target 286 pembudidaya ikan. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 705.650.000,- dengan output sub kegiatan adalah jumlah sarana budidaya yang disediakan dengan target 41 unit sarana budidaya dan terrealisasi sebesar 100%. Sarana budidaya tersebut selanjutnya diserahkan kepada 41 kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebagai bentuk pembinaan terhadap pembudidaya ikan. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan sehingga masih sangat diperlukan adanya peningkatan sarana perikanan budidaya untuk tahun-tahun mendatang.

D. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.910.696.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.357.800.880,- (71,06%) dengan indicator outcome jumlah produksi pengolah hasil perikanan dengan target 1.329 ton dan telah terrealisasi sebanyak 1.433,98 ton (100%) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 2 kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan kemandirian Hasil Perikanan bagi

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pembinaan Mutu dan kemandirian Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 1.023.935.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 558.160.040,- (54.51%)



dengan output kegiatan jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina dengan target 600 UPI dan terrealisasi sebanyak 600 UPI (100%). Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.023.935.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 558.160.040,- (54,51%) dengan output sub kegiatan adalah jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala hasil usaha dan risiko dengan target 600 unit usaha dan terrealisasi sebesar 100%.

- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri

Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri berupa masukan dana pada Tahun 2023 sebesar Rp. 886.761.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 799.640.840,- (90,18%) dengan output kegiatan jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan pengolahan (ton) dengan target 52.827,65 ton dan terrealisasi sebanyak 52.901,56 (100%). Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana pada tahun 2023 sebesar Rp. 886.761.910,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 799.640.840,- (90,18%) dengan output sub kegiatan adalah jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target 530 ton dan terrealisasi sebanyak 596,95 ton (100%).



Perkiraan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Batam dalam mendukung pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam pada tahun 2024 terdiri dari 4 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 25.785.595.542,- (dua puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan rincian dan perkiraan realisasi sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 13,554,810,804,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 14,296,894,224,-. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah hingga triwulan II sebesar Rp. 5,523,388,355,-. Indikator Program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 40,75%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 kegiatan

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 10,648,163,364,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12.506.314.967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 4,901,843,698. Indikator Kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 46,03%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 10,598,163,364,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 12,506,314,967,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 4,901,843,698,- atau sebesar 46,25% dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 74 ASN.



- ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp. 50,000,000,- sedangkan yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 sebesar sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 210,564,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Oleh karenanya kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi kinerja dan keuangannya sebesar 0%.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 651,316,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 335,932,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 21.348.000,- atau sebesar 3,28% dibandingkan dengan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024. Indikator Kegiatan adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 3,28%. yang terdiri dari 5 sub kegiatan;
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,840,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 2,416,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di APBD Tahun 2024. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 200,223,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 146,990,500,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari Dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator sub

Commented [a1]: Beda dengan SEPP: 21.348.000 (6.35%)



- kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.
- iii. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17,406,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 16,224,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8.000.000,- atau sebesar 45,96% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 45,96%.
- iv. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24,954,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 17,116,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari anggaran yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 2 paket dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.
- v. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 399,893,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 153,186,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 13,348,000,- atau sebesar 3,34% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 3,34%.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 351,429,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 77,185,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 9,31% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Commented [a2]: Beda dengan SEPP

Commented [a3]: Cek ulang

Commented [a4]: Cek ulang

Commented [a5]: Cek ulang



Daerah yang terpenuhi tahun dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 9,03%. Capaian realisasi kinerja kegiatan ini tergolong sangat rendah karena terbentur dengan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan;

i. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Meubel.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 84,623,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 23,160,000,-. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan dengan target 25 unit. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja.

Commented [a6]: Cek ulang

ii. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 250,202,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 54,025,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 31,720,000,- atau sebesar 12,68% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 12,68%.

Commented [a7]: Cek ulang

iii. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 16,604,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-.

Commented [a8]: Cek ulang

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,233,115,440,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,064,544,760,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 471,255,466,- atau sebesar 38,22% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi sebesar 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 38,22%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

Commented [a9]: Cek ulang

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Commented [a10]: - Tidak sinkron dengan yang tercantum pada Tabel.
-Beda dengan SEPP: 471.255.466



Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 176,870,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 139.366.200,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 60,082,314,- atau sebesar 33,97% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 4 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 33,97%.

Commented [a11]: Cek ulang

ii. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,056,245,440,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 925,178,560,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 411,173,152,- atau sebesar 38,93%. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 44,44%.

Commented [a12]: Cek ulang

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 312,917,000,- dengan realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 97,221,200,- atau sebesar 21,14% dari dana yang dialokasikan pada Renja. Indikator Kegiatan adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100% dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 21,14%. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan;

Commented [a13]: Cek ulang

i. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 247,360,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 247,360,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 96,621,200,- atau sebesar 39,06% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan



Perizinannya dengan target 12 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 39,06%.

ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 29,620,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target 25 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0%.

Commented [a14]: Cek ulang

Commented [a15]: Cek ulang, 18.010.000

iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 182,950,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 47,547,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 600.000,- atau sebesar 0,33% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi dengan target 2 unit dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0,33%.

Commented [a16]: Cek ulang

Commented [a17]: Beda di SEPP: 60.000

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 8,865,689,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,991,447,790,-. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap hingga triwulan II sebesar Rp. 1,292,277,500,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi nelayan kecil dengan target 20765 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 14,58%.

a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8,522,673,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,991,447,790,- Realisasi keuangan Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah hingga triwulan II sebesar Rp. 1,292,277,500,- atau sebesar 14,58% dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 KUB. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

Commented [a18]: Beda di SEPP: 1.292.277.500



- i. Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7,216,339,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7,053,402,190,- Realisasi keuangan Sub Pengembangan kapasitas Nelayan Kecil hingga triwulan II sebesar Rp. 790,452,500,- atau sebesar 10,95% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan target 357 Orang.
 - ii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 151,379,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.
 - iii. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,154,955,000,- sedangkan yang dialokasikan untuk sub kegiatan tersebut pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 938,045,600,- Realisasi keuangan Sub Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha hingga triwulan II sebesar Rp. 501,825,000,- atau sebesar 43,45% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan target 3444 Unit Usaha dan realisasi fisik hingga triwulan II sebesar 43,45%.
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 343,016,000,- Sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 2,595,777,500,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi Program Pengelolaan

Commented [a19]: Beda di SEPP: 501.825.000



Perikanan Tangkap hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi pembudidaya ikan dengan target 7831 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 0,33%.

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,595,777,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,33% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP target 308 Pembudidaya Ikan dan realisasi hingga triwulan II sebesar 2 Pembudidaya Ikan atau sebesar 0,33% dari target. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu:

i. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 100,485,500,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-. Karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

ii. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2,340,714,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,155,997,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 8,550,000,- atau sebesar 0,37% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 175 unit.

iii. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 154,578,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Dana yang dialokasikan pada Renja 2024 adalah sebesar Rp 2,200,330,000,- sedangkan dana yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 1,675,026,100,-. Realisasi Program Pengolahan Dan



Pemasaran Hasil Perikanan hingga triwulan II sebesar Rp. 797,476,410,-. Indikator Program adalah Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan dengan target 1.342,89 Ton dan yang terealisasi hingga triwulan II sebesar 36,24%.

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,623,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 46,80% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan 1.369.88 Ton.

Commented [a20]: Cek ulang: 1.000.623.750

Commented [a21]: Tidak sinkron dengan yang tercantum pada Tabel

- i. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,000,623,750,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 924,392,100,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 468,313,000,- atau sebesar 46,80% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 600 Unit Usaha.

Commented [a22]: Cek ulang: 1.000.623.750

- b. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,199,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,- Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 329,163,410,- atau sebesar 27,43% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator Kegiatan adalah Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan dengan target 53,355.88 ton. Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan;

Commented [a23]: Beda di SEPP: 329.163.410

- i. Sub Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.



Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,020,000,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 750,634,000,-. Realisasi keuangan hingga triwulan II sebesar Rp. 329,163,410,- atau sebesar 32,27% dari dana yang dialokasikan di Renja. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 528 ton.

- ii Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Dana yang dialokasikan pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 179,998,000,- sedangkan yang dialokasikan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,- karena pertimbangan kondisi keuangan daerah. Karena itu realisasi kinerja dan keuangan Sub Kegiatan tersebut hingga triwulan II sebesar 0%.

Commented [a24]: Tidak sinkron dengan yang tercantum pada table.
Beda diSEPP: 329.163.410

Realisasi Pelaksanaan Renstra Sampai Dengan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra 2021-2026. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Dinas Perikanan Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 capaian Renstra Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat



Daerah sebesar 0%. Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah adalah Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah sebesar 100%.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100%. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 100%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah Jumlah produksi nelayan kecil (ton) dengan target sampai tahun 2024 adalah 20.765 ton. Sampai dengan Tahun 2024 perkiraan capaian Renstra Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 59.704 ton



(100%). Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan dengan target sampai Renstra tahun 2024 adalah 0%. Perkiraan capaian renstra sampai Tahun 2024 adalah 0%.

- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target sampai Renstra tahun 2024 adalah 3 kelompok. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra sebesar 9 kelompok (100%).

- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan TPI dengan target sampai Renstra Tahun 2024 adalah 3 dokumen. Kegiatan tidak dilaksanakan hingga Tahun 2026 karena pertimbangan kewenangan pemerintah kota terkait masalah laut, sehingga perkiraan capaian Renstra hingga Tahun 2026 sebesar 0%.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton) dengan target sampai Tahun 2024 Renstra adalah 7.831 ton. Sampai dengan tahun 2024 perkiraan capaian Renstra Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 32.575 ton (100%). Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang memenuhi standar sesuai SOP dengan target sampai Tahun 2023 Renstra tahun 2026 adalah 792 RTP. Sampai dengan tahun 2023 perkiraan capaian Renstra sebesar 740 RTP (93,43%).

- b. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil



Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya. Kegiatan ini akan dimulai pelaksanaannya pada Tahun 2024.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Indikator Kinerja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan adalah Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton) dengan target sampai Tahun 2024 Renstra adalah 2.646,02 ton. Sampai dengan tahun 2023 Renstra perkiraan capaian sebesar 2.703 ton (100%). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 3 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
Indikator Kegiatan adalah Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar dengan target sampai Tahun 2023 Renstra adalah 120 UPI. Sampai dengan tahun 2024 Renstra perkiraan capaian sebesar 0 karena rasionalisasi.
- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Kegiatan adalah Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan dengan target sampai Tahun 2023 Renstra adalah 105.132,26 ton. Sampai dengan tahun 2024 Renstra perkiraan capaian sebesar 105.224,32 ton (100%).
- c. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
Indikator Kegiatan adalah Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan target sampai Tahun 2023 Renstra adalah 40 unit usaha. Sampai dengan tahun 2023 Renstra perkiraan capaian sebesar 40 unit usaha (100%).

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja. OPD dan pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Batam

PD : Dinas Perikanan Kota Batam

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.	Urusan Pilihan									
3.25	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan									
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.02	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = 5+7+9	11 = 10/4
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil (ton)	20.972	20.742	20.559	18.197	88,51%	20.765	59.704	100%
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan sarana perikanan tangkap yang disediakan	26%	0%	-	-	-	-	0%	0%
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	3	3	3	3	100%	3	9	100%
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen perencanaan untuk pembangunan TPI	3	0	0	0	0	0	0	0
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan (ton)	7.988	17.203	7.678	7.541	98,22%	7.831	32.575	100%
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	1	-	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja 2023	Realisasi Renja 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah RTP yang memenuhi standar sesuai SOP (RTP)	330	264	286	449	100%	308	1.021 RTP	100%
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan (ton)	1.356,32	1.316,43	1.329,59	1.023	76,94%	1.342,89	3.682,32	100%
3.25.06.2.01	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar (UPI)	10 UPI	0	0	0	0	0	0	0
3.25.06.2.02	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (unit usaha)	40	0	40	600	100%	40	640	100%
3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan (ton)	53.889,49	52.304,61	52.827,65	40.412,65	76,50%	53.355,93	146.073,19	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Batam

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota, antara lain :

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan, sesuai lingkup tugasnya;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, daya saing produk perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan Keputusan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja di Lingkungan Dinas Perikanan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dapat dikaji dari Indikator Kinerja Kunci dalam Urusan Pilihan bidang Perikanan yang telah ditetapkan meliputi, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil, Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan, dan Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kota Batam

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Satuan	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024*	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)		(13)	(14)
1	Nilai Tukar Nelayan		√	101,50	102	102,50	103	101,50	102	102,50	103	Indeks	Memenuhi target
2	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil		√	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	%	Memenuhi target
3	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan		√	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	%	Memenuhi target
4	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan		√	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	%	Memenuhi target

* Merupakan angka estimasi capaian tahun 2024



Capaian Indikator Kinerja diukur berdasarkan realisasi capaian dibandingkan dengan target. Target tersebut diukur dari jumlah /volume yang diinginkan dibandingkan dengan kondisi kinerja awal, Indikator tersebut meliputi :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar 101,50 dengan capaian realisasi sebesar 101,50 atau memenuhi target. Pada tahun 2024 NTN ditargetkan menjadi 102.
2. Produksi Nelayan Kecil pada Tahun 2023 ditargetkan peningkatan sebesar 1% dari Tahun 2022 dengan capaian realisasi 1% atau memenuhi target. Pada tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 1%.
3. Produksi Pembudidaya Ikan pada Tahun 2023 ditargetkan peningkatan sebesar 2% dari Tahun 2022 dengan capaian 2% atau memenuhi target. Pada Tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 2%.
4. Produksi Pengolah Hasil Perikanan pada tahun 2023 ditargetkan meningkat sebesar 1% dari Tahun 2022 dengan capaian realisasi 1% atau memenuhi target. Pada Tahun 2024 peningkatan produksi ditargetkan sebesar 1%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Aspek Ekonomi
 - Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah
 - Kurang berkembangnya pasar domestik dan pengamanan kualitas ikan
 - Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas
2. Aspek Sosial
 - Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah
 - Teknologi dan system produksi yang terbatas
3. Aspek Lingkungan
 - Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai
 - Penurunan Kualitas lingkungan/perairan
4. Aspek Kelembagaan
 - Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping lapangan perikanan



- Sistem pendataan perikanan yang belum andal dan efisien

Terdapat enam isu strategis yang ada dalam Pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam yang permasalahan dan dampaknya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City (REC) di Pulau Rempang Kecamatan Galang.

Hingga Tahun 2023 Pulau Rempang masih menjadi sentra produksi perikanan budidaya terutama budidaya udang dan ikan air tawar. Dengan dimulainya PSN Rempang Eco City yang diperkirakan pada Tahun 2024 kemungkinan besar tambak dan kolam budidaya sudah tidak beroperasi lagi sehingga berpotensi besar menurunkan produksi perikanan budidaya Kota Batam. Untuk mengantisipasi hal tersebut ke depan, perlu dikembangkan budidaya system resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan yang kosong.

2. Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang sebagian besar merupakan pelaku usaha skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan di Kota Batam. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

3. Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah

Pekerjaan nelayan, pembudidaya ikan merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan dan pembudidaya ikan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan dan budidaya ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas.



4. Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan di Kota Batam merupakan usaha skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 3 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Kota Batam. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan “limited access” secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negative berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber trophic level, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran

sumberdaya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek, jika sumberdaya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat.

5. Penurunan Kualitas Lingkungan/Perairan

Permasalahan lingkungan/perairan disebabkan oleh pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan kita tinggi namun tidak semua sumberdaya tersebut dapat dikembangkan untuk perikanan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan misalnya, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan disebabkan oleh pencemaran laut seperti karena penggunaan transportasi, aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan. penebangan hutan (erosi yang menimbulkan pelepasan dan dekomposisi bahan-bahan kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan sungai, pengelolaan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbalan (upwelling) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.



6. Kapasitas tenaga pendamping lapangan

keterbatasan pelayanan penyuluhan belum berkembang dengan baik dikarenakan kemampuan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan yang cukup luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pendamping lapangan perikanan yang kuat. Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini akan berdampak terhadap tidak maksimalnya transfer pengetahuan dan teknologi sehingga sulitnya nelayan dan pembudidaya di pulau-pulau

Tantangan Dinas Perikanan Kota Batam

1. Mewujudkan pemasaran hasil perikanan yang sistemik melalui pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI).
2. Terbatasnya kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan
3. Terbatasnya jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan
4. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan untuk pengembangan usaha
5. Terbatasnya fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan

Mengacu kepada lima tantangan yang disampaikan di atas, berikut adalah lima rekomendasi yang dapat disampaikan :

1. Mengembangkan system budiaya resirkulasi seperti bioflok yang bersifat portable (dapat dipindahkan) agar dapat memanfaatkan lahan secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan perikanan
3. Meningkatkan kapasitas tenaga pendamping perikanan lapangan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan.
5. Meningkatkan fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan



Dari rekomendasi tersebut dapat direncanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana pada bab IV.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan membandingkan Rancangan RKPD dengan analisa hasil kebutuhan yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 pada halaman berikut.



Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025

OPD: Dinas Perikanan

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
A	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Batam	Jumlah produksi nelayan kecil	20.972 ton	8.864.965.000,-	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kota Batam	Jumlah produksi nelayan kecil	20.972 ton	8.468.167.500,-	
	I Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0%	0,-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0%	0,-	Di Batam tidak ada pengelolaan penangkapan ikan di perairan tawar
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kota Batam	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) kabupaten/kota	0 dokumen	0,-	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kota Batam	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) kabupaten/kota	0 dokumen	0,-	Di Batam tidak ada pengelolaan penangkapan ikan di perairan tawar
	II Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	10 kelompok	8.864.965.000,-	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	10 kelompok	8.517.507.000,-	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	10 kelompok	8.864.965.000,-	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	10 kelompok	8.468.167.000,-		
	1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Batam	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 orang	100.000.000,-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kota Batam	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 orang	72.620.000,-		
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	40 kelompok	200.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kota Batam	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	60 kelompok	149.472.000,-		
	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Batam	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	5.000 unit usaha	1.600.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kota Batam	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	5.000 unit usaha	1.506.264.000,-		
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	50 unit	6.964.965.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Kota Batam	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	381 unit	6.739.811.500,-		
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		Kota Batam	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	7.988 ton	688.223.626 ,-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kota Batam	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	7.988 ton	2.157.153.000,-		
	I	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Batam	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	3 kelompok	215.000.000,-	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Batam	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	3 kelompok	138.408.000,-	Penambahan anggaran untuk peng- uatan kapa- sitas pambu- didaya ikan kecil	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Batam	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 kelompok	150.000.000,-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kota Batam	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 kelompok	86.668.000,-	Penambahan anggaran untuk penguatan kapasitas pembudidaya ikan kecil
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Batam	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	20 kelompok	65.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Batam	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	30 kelompok	51.740.000,-	Untuk penguatan kelembagaan kelompok
	II	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Batam	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	360 Pembudidaya Ikan	1.002.000.000,-	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Batam	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	360 Pembudidaya Ikan	2.018.745.000,-	Penambahan anggaran untuk pembangunan Balai benih Ikan (BBI)
	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	50.000.000,-	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	42.414.000,-	
	2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	12 Dokumen	70.000.000,-	Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Dokumen hasil Pelaksanaan monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	66.059.000,-	Penambahan anggaran Untuk memperkuat monitoring kesehatan ikan dan lingkungan



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	3	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31 unit	882.000.000,-	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	137 Unit	1.910.272.000,-	Penambahan anggaran untuk pembangunan Balai benih Ikan (BBI)	
	4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Batam	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	0 orang	0,-	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kota Batam	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	0 orang	0,-	Pembinaan dan pemantauan dapat dilakukan seiring pemantauan kesehatan ikan	
C	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Kota Batam	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1.356,32 ton	900.000.000,-	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kota Batam	Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1.356.32 ton	1.227.523.000,-		
	I	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Batam	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Mikro dan Kecil Yang terdaftar	4 Dokumen	100.000.000,-	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Batam	Jumlah jenis Data dab Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan risiko	0 Dokumen	0,-		
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 dokumen	100.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 dokumen	0,-		



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	II	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Batam	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	0 unit usaha	0,-	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Batam	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	unit usaha	305.182.000,-		
	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Batam	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	0 unit usaha	0,-	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kota Batam	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	200 unit usaha	305.182.000,-		
	III	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan (ton)	53.889,49 ton	800.000.000,-	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan (ton)	53.889,49 ton	922.341.000,-		
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	534 ton	600.000.000,-	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	534 ton	539.038.000,-		



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	40 pelaku usaha	200.000.000,-	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	88 pelaku usaha	383.303.000,-		
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	15.409.733.161,-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17.229.515.161,-		
	I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	13.607.183.161,-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	15.598.605.201,-		
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 orang/bulan	13.607.183.161,-	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	15.598.605.201,-		
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0,-		
	II	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	188.500.000,-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	122.640.000,-		
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 paket	88.500.000,-	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Batam	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	0,-		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	100.000.000,-	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Batam	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	122.640.000,-	
	III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	457.250.000,-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	718.874.500,-	
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.500.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.500.000,-	
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	149.050.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	219.597.000,-	
	2						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.597.000,-	
	5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	19.200.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000,-	
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	27.500.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	17.116.000,-	



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	257.000.000,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	293.591.000,-	
	7						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Perikanan)	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	32.950.000,-	
	IV	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	615.000.000,-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	198.452.560,-	
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	115.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	114.970.000,-	
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	500.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	83.482.560,-	
	V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	164.900.000,-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	301.347.000,-	
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	2 paket	57.800.000,-	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Batam	Jumlah paket mebel yang disediakan	71 unit	57.679.000,-	
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	66.500.000,-	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	27 unit	228.140.000,-	



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
NO	Kebutuhan Dana		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	40.600.000,-	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	15.528.000,-		
	VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	376.900.000,-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	387.208.000,-		
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	12 unit	200.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	12 unit	210.480.000,-		
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	28 unit	26.900.000,-	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	38 unit	26.860.000,-		
	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	150.000.000,-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 unit	149.868.000,-		



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Batam hingga tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjangkaran kebutuhan masyarakat dilakukan melalui aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang bernama Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) yang diajukan ke Dinas Perikanan Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Perikanan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Dinas Perikanan Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2025 akan disampaikan pada Rancangan Renja Dinas Perikanan Kota Batam.



Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI
MASYARAKAT
TAHUN 2025 KOTA BATAM

OPD : Dinas Perikanan Kota Batam

NO	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2		3	5	6	7
I	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					
1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.					
	a	Pengadaan Mesin Boat (15 PK sebanyak 60 unit)	Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	b	Bantuan Mesin Tempel 15 PK (35 unit)	Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	c	Bantuan Bento Korea (3.500 buah)	Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	d	Pengadaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap Mesin 15 PK YAMAHA (20 unit)	Kelurahan Bulang Kebam, Kecamatan Bulang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	e	Pengadaan Mesin Yamaha 15 PK	Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	f	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Apolo,Kawat,Binto	Kelurahan Temoyong, Kecamatan Bulang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	g	Pengadaan Alat Tangkap Jaring Tenggiri	Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakangpadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	h	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakangpadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat



NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	NO
I	Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	1 Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.				
	i Bantuan Alat Tangkap	Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakangpadang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	j Pengadaan mesin boat	Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	k Mesin Tempel 15 PK	Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	l Pengadaan Mesin Tempel Yamaha 15 Pk	Kelurahan Batu Legong, Kecamatan Bulang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Usulan masyarakat
	m Pengadaan Mesin 15 pk 3 Unit, Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	n Mesin tempel 15 pk= 25 unit, mesin 40 pk= 4 unit	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	o Pengadaan boat dan mesin (5 paket), kawat bubut (20 paket)	Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang, Kecamatan Sei Beduk, dan Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	p Pengadaan kapal fiber / mesin katinting volume 12 unit	Kecamatan Belakang Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	q Pengadaan boat dan mesin 3 boat pancung 24 kaki fiber, 3 mesin 15 pk	Kecamatan Bengkong dan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	r Mesin ketinting 10pcs	Kecamatan Sei Beduk	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	s Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap (alat tangkap, kawat bubu, jaring kelong, jaring udang 1 lusin)	Kecamatan Nongsa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir



	t	Pengadaan sampan fiber 6 sampan 18 kaki, Alat tangkap ikan (empang dan kawat) 2 paket	Kecamatan Belakang Padang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	u	Pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap ikan 1 paket	Kecamatan Bulang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	v	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan, Jaring Tenggiri 100 pcs + Mesin 15 pk 3 unit	Kelurahan Tanjung Uma	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
	w	Bantuan boat seloding 21, Mesin tempel yamaha 40 pk, Bubu bento dan jaring awal	Kecamatan Galang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil		Pokir
II	Pengelolaan Perikanan Budidaya					
1	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
	a	Bantuan Bibit Ikan Kerapu Cantang	Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakangpadang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Usulan masyarakat
	b	Pengadaan Bioflok, Pengadaan Pakan Ikan Air Tawar 4 Ton	Kecamatan Belakang Padang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	c	Bibit ikan bioflok (25 unit)	Kel. Kibing, Kel. Tj Uncang, Kel.Tani Kampung Pelanduk	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	d	Pengadaan budi daya ikan kerapu serta sarana dan prasarana budidaya ikan kerapu	Kecamatan Batu Ampar	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	e	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu 5000 Ekor	Kecamatan Sekupang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	f	Pengadaan bibit ikan kakap 10.000 ekor , Pengadaan pembibitan ikan lele 10.000 ekor	Kelurahan Tanjung Uncang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	g	Pengadaan bibit ikan lele @20000, Nila @ 10000, gurame@10000, belut@20000	Kecamatan Sei Beduk	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah		Pokir



				Kabupaten/Kota		
	h	Paket budidaya ikan air tawar sistem bioflog (20 paket), Pengadaan bibit dan pakan ikan lele (10 ribu ekor), Pengadaan bibit dan pakan ikan patin (10 ribu ekor)	Kecamatan Sei Beduk	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	i	Pengadaan Bioflok, 10 Paket	Kecamatan Sagulung	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	j	Pengadaan bibit ikan karapu 1.500 ekor, Pengadaan kolam bioflog dan benih ikan nila 15 kolam dan bibit ikan nila,	Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Sekupang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
	k	Pengadaan benih ikan kerapu jantan 5.000 ekor	Kecamatan Galang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pokir
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
I	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	a	Pengadaan alat pengolahan ikan (buat kerupuk) 50 pcs	Kecamatan Sekupang	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		Pokir



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sementara Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030 belum disahkan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 masih menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Visi Presiden “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

”
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
”

MISI



Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia



Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing



Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan



Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan



Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya



Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga



Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya



Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan



Terkait dengan visi dan misi presiden tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020 - 2024

No.	Program Prioritas	Uraian
I.	Sumber Daya Manusia	1. Pendidikan Vokasi Berbasis Enterpreneurship
		2. Pelatihan Teknis untuk Masyarakat
		3. Sertifikasi Kompetensi Pelaku Utama
		4. Digitalisasi Penyuluhan dan Pelatihan
		5. Hilirisasi Hasil Inovasi dan Riset
II.	Penataan Regulasi	1. Evaluasi dan Simplifikasi Regulasi
		2. Harmonisasi Peraturan Perundangan Terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM dalam Rangka Peningkatan Investasi
		3. Penyederhanaan Regulasi
		4. Penyusunan Regulasi untuk Mendukung Pembangunan KP
III.	Menyederhanakan Birokrasi	1. Peningkatan Pelayanan Publik
		2. Penguatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
		3. Penyederhanaan Prosedur dan Tata Laksana
		4. Transformasi ASN Fungsional ke Jabatan Struktural
IV.	Infrastruktur	1. Pelabuhan Perikanan
		2. Budidaya Perikanan
		3. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu
		4. Sistem Rantai Dingin
		5. Sentra Pengolahan
		6. Pasar Ikan Modern
		7. Kampung Nelayan Maju
		8. Rehabilitasi Kawasan Pesisir
		9. Prasarana Pergaraman Rakyat
V.	Transformasi Ekonomi	1. Industri Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing: Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan, Pemasaran, Garam Rakyat & Wisata Bahari

Selaras dengan program prioritas nasional, program prioritas Dinas Perikanan Kota Batam mengarah kepada peningkatan produksi nelayan kecil, produksi pembudidaya ikan, dan produksi pengolah hasil perikanan agar kesejahteraan masyarakat perikanan tersebut meningkat.



3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Budidaya”. Selanjutnya sebagaimana yang tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021-2026 selaras dengan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 tersebut, tujuan yang ditetapkan Dinas Perikanan Kota Batam adalah:
“Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan” dengan indicator nilai tukar nelayan (NTN).

Agar tujuan tersebut bisa dicapai Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan sasaran berupa:

“Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan”, dengan indikator sasaran:

- 1. Persentase peningkatan produksi nelayan kecil;
- 2. Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan;
- 3. Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan.

Dalam perencanaan Tahun 2025 target tujuan dan sasaran serta indicator tujuan dan sasaran Dinas Perikanan tertera sebagaimana table berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan		Nilai Tukar Nelayan	102,50
2		Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	1 persen
			Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	2 persen
			Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1 persen



3.3 Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun 2025 ini merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 – 2026. Dimana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang hendak dicapai Walikota Batam sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil dan Budidaya dengan indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN). Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini diarahkan untuk melaksanakan kegiatan ketatausahaan dinas sehingga dapat mencapai program-program yang telah ditentukan. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dalam rangka untuk mencapai program tersebut adalah :

- I. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- II. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- IV. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan kecil baik yang berada di mainland maupun hinterland. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang dalam rangka mencapai program tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya ikan baik yang berada di mainland maupun hinterland. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang dalam rangka mencapai program tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
 1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- II. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.



3. Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengolah hasil perikanan baik yang berada di mainland maupun hinterland. Rencana Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 yang dalam rangka mencapai program tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
 1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko.
- II. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari program-program Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

- Nelayan kecil
- Pembudidaya ikan
- Pengolah dan pemasar hasil perikanan
- ASN di Lingkungan Dinas Perikanan

LOKASI PENYEBARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Lokasi program/kegiatan tersebar di wilayah Kota Batam baik mainland maupun hinterland.

TOTAL KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

Adapun Pagu indikatif yang direncanakan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.131.698.161,- (Dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus enam puluh satu Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD) Kota Batam. Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 disampaikan pada tabel 3.3.



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	6	7	8	9	
					DINAS PERIKANAN			27.216.607.304,00		29.131.698.661		24.198.064.967
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			27.216.607.304,00		29.131.698.661		24.198.064.967
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			27.216.607.304,00		29.131.698.661		24.198.064.967
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	13.554.810.804,00	100 %	17.229.515.161	100 %	15.553.064.967
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100 %	10.648.163.364,00	100 %	15.598.605.201	100 %	13.906.314.967
3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan	10.598.163.364,00	95 orang/bulan	15.598.605.201	95 orang/bulan	13.906.314.967
3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100 %	210.564.000,00	100 %	122.640.000	100 %	100.000.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	84 Paket	60.564.000,00	0 Paket	0	0 Paket	0	
3	25	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	150.000.000,00	8 Orang	122.640.000	8 Orang	100.000.000	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	651.608.500,00	100 %	586.545.280	100 %	467.250.000	
3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.840.000,00	1 Paket	4.500.000	1 Paket	4.500.000	
3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	200.515.500,00	3 Paket	261.338.280	3 Paket	149.050.000	
3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.406.000,00	1 Paket	10.000.000	1 Paket	19.200.000
3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.954.000,00	1 Paket	17.116.000	1 Paket	27.500.000
3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	399.893.000,00	12 Laporan	293.591.000	12 Laporan	267.000.000
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	351.429.000,00	100 %	301.347.000	100 %	171.500.000
3	25	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	84.623.000,00	71 unit	57.679.000	71 unit	60.000.000
3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	250.202.000,00	27 unit	228.140.000	27 unit	69.500.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	16.604.000,00	3 Unit	15.528.000	3 Unit	42.000.000
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	1.233.115.440,00	100 %	156.711.280	100 %	520.000.000
3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	176.870.000,00	12 laporan	114.970.000	12 Laporan	120.000.000
3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.056.245.440,00	12 Laporan	41.741.280	12 Laporan	400.000.000
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100 %	459.930.500,00	100 %	463.666.400	100 %	388.000.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	247.360.000,00	12 Unit	210.480.000	12 Unit	200.000.000
3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	29.620.000,00	38 unit	26.860.000	38 unit	28.000.000
3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	182.950.500,00	1 Unit	226.326.400	1 Unit	160.000.000
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi nelayan kecil	20.765 Ton	8.865.689.000,00	20.972 ton	8.468.167.500	21.182 ton	6.155.000.000
3	25	03	2,01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah	Cakupan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	0	0	0%	0	0%	0



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Kabupaten/ Kota							
3	25	03	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan							
						Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) kabupaten/kota		0	0 dokumen	0	0 dokumen	0
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	3 KUB	8.522.673.000,00	3 KUB	8.468.167.500	3 KUB	6.155.000.000
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil							
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	400 Orang	7.216.339.000,00	50 orang	72.620.000	50 orang	100.000.000
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil							
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	50 Kelompok	151.379.000,00	60 Kelompok	149.472.000	60 Kelompok	255.000.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha								
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3400 Unit Usaha	1.154.955.000,00	5.000 Unit Usaha	1.506.264.000	5.000 Unit Usaha	1.600.000.000	
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil								
						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	0	0	381 Unit	6.739.811.500	381 Unit	4.200.000.000	
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan TPI	3 Dokumen	343.016.000,00	0	0	0	0	
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)								
						Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 Dokumen	343.016.000,00	0	0	0	0	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7831 Ton	2.595.777.500,00	7.988 Ton	2.157.153.000	8.148 Ton	1.265.000.000	



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		308 Pembudidaya Ikan	2.595.777.500,00	330 Pembudidaya Ikan	138.408.000	352 Pembudidaya Ikan	225.000.000
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil							
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0	0	20 Kelompok	86.668.000	20 Kelompok	160.000.000
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
						Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0	0	30 Kelompok	51.740.000	30 Kelompok	65.000.000
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	308 Pembudidaya Ikan	2.595.777.500,00	330 Pembudidaya Ikan	2.018.745.000	352 Pembudidaya Ikan	1.040.000.000
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100.485.500,00	4 Dokumen	42.414.000	4 Dokumen	65.000.000
3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			12 dokumen	66.059.000	12 dokumen	75.000.000
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	175 Unit	2.340.714.000,00	137 unit	1.910.272.000	137 unit	900.000.000
3	25	04	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	0	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat							
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	140 Orang	154.578.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1342.89 Ton	2.200.330.000,00	1.356,32 Ton	1.227.523.000	1,369.88 Ton	1.225.000.000
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	600 unit usaha	1.000.332.000,00	40 Unit Usaha	305.182.000	40 Unit Usaha	400.000.000
3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	600 Unit Usaha	1.000.332.000,00	0 unit usaha	0	0 unit usaha	0
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							
						Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala	0 Unit Usaha	0	200 unit usaha	305.182.000	200 unit usaha	400.000.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
						Usaha dan Risiko						
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang tersedia dan tersalurkan	53.355,93 Ton	1.199.998.000,00	53.889,49 Ton	922.341.000	54,428.38 Ton	825.000.000
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	528 Ton	1.020.000.000,00	534 Ton	539.038.000	534 Ton	625.000.000
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	179.998.000,00	88 Pelaku Usaha	383.303.000	88 Pelaku Usaha	200.000.000
					UPTD PELAYANAN BIDANG PERIKANAN							53.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							53.000.000
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							53.000.000
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							53.000.000



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Prgram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		0	0	100%	49.339.500	100%	53.000.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	3 Paket	16.389.500	3 Paket	19.000.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Paket	0	12 Laporan	32.950.000	12 Laporan	34.000.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintah saat ini yakni mewujudkan *“Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*.

Untuk mencapai sasaran pembangunan daerah di bidang perikanan, sesuai indikator sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kota Batam menyusun Rencana kerja tahun 2025 yang mana Program dan kegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 – 2026. Rumusan Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berupa masukan dana sebesar Rp. 17.229.515.161,- dengan output kegiatan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran berupa masukan input dana sebesar Rp. 15.598.605.201,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 95 orang/bulan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah berupa masukan dana sebesar Rp.



122.640.000,- dengan output kegiatan Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana dengan target 100%. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi berupa masukan dana sebesar Rp. 122.640.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 10 orang dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berupa masukan dana sebesar Rp. 586.545.280,- dengan output kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar 100%. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa masukan dana sebesar Rp. 4.500.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dengan target 1 paket dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa masukan input dana sebesar Rp. 261.338.280,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 3 paket dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelayanan Bidang Perikanan)

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa masukan input dana sebesar Rp. 16.389.500,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang



Disediakan dengan target 3 paket dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa masukan dana sebesar Rp. 10.000.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa masukan dana sebesar Rp. 17.116.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target 1 paket dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa masukan dana sebesar Rp. 293.591.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pelayanan Bidang Perikanan)

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berupa masukan dana sebesar Rp. 32.950.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 12 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana sebesar Rp. 301.347.000,- dengan output kegiatan Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 100%. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel



Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Mebel berupa input dana sebesar Rp. 57.679.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah unit mebel yang disediakan dengan target 71 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan dana sebesar Rp. 228.140.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target 27 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa masukan dana sebesar Rp. 15.528.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan target 3 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana sebesar Rp. 156.711.280,- dengan output kegiatan Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target sebesar 100%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa masukan dana sebesar Rp. 114.970.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan dengan target 12 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berupa masukan dana sebesar Rp. 41.741.280,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah



laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan dengan target 12 laporan dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berupa masukan dana sebesar Rp. 463.666.400,- dengan output kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target sebesar 100%. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berupa input dana sebesar Rp. 210.480.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya dengan target 12 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa masukan dana sebesar Rp. 26.860.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dengan target 38 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berupa masukan dana sebesar Rp. 226.326.400,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi dengan target 1 unit dan perkiraan realisasi sebesar 100%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 8.468.167.500,- dengan output kegiatan Jumlah kelompok



nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3 kelompok usaha Bersama (KUB). Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 72.620.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dengan target 50 orang dan perkiraan realisasi 100%.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 149.472.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya dengan target 60 kelompok dan perkiraan realisasi 100%.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha berupa masukan dana sebesar Rp. 1.506.264.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha dengan target 5.000 unit usaha dan perkiraan realisasi 100%.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 6.739.811.500,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil dengan target 381 unit dan perkiraan realisasi 100%.

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil .

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp.



138.408.000,- dengan output kegiatan Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya dengan target 1 Kelompok. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 86.668.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan dengan target 20 kelompok dan perkiraan realisasi 100%.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 51.740.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan dengan target 30 kelompok dan perkiraan realisasi 100%.

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan berupa masukan dana sebesar Rp. 2.018.745.000,- dengan output kegiatan Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP dengan target 330 pembudidaya ikan. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terdiri dari 3 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 42.414.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4 dokumen dan perkiraan realisasi 100%.

2. Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1



(satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 66.059.000,- dengan output sub kegiatan adalah Dokumen hasil pelaksanaan monitoring Kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 12 dokumen dan perkiraan realisasi 100%.

3. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 1.910.272.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 137 unit dan perkiraan realisasi 100%.

D. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

- a. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil berupa masukan dana sebesar Rp. 305.182.000,- dengan output kegiatan Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan target 40 unit usaha. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil terdiri dari 1 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko berupa masukan dana sebesar Rp. 305.182.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 200 Unit Usaha dan perkiraan realisasi 100%.



- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 922.341.000,- dengan output kegiatan Jumlah ikan konsumsi yang disediakan dan disalurkan (ton) dengan target 53.889,49 ton. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 2 sub kegiatan:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 539.038.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 534 ton dan perkiraan realisasi 100%.

2. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator, Tolok ukur kinerja dan target kinerja Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa masukan dana sebesar Rp. 383.303.000,- dengan output sub kegiatan adalah Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dengan target 88 pelaku usaha dan perkiraan realisasi 100%.

Adapun rekapitulasi rencana kerja dan pendanaan Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana tabel 4.1 :



**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025**

OPD: Dinas Perikanan

No	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi
I	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan				29.082.358.661	Batam
A	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Nelayan Kecil	20.972 ton	8.468.167.500	Batam
	I	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	3 KUB	8.468.167.500	Batam
	1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	50 orang	72.620.000	Batam
	2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	60 kelompok	149.472.000	Batam
	3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha	5.000 unit usaha	1.506.264.000	Batam
	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	381 unit	6.739.811.500	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
B	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan	7.988 Ton	2.157.153.000	Batam
	I Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang meningkat status kelasnya	1 kelompok	138.408.000	Batam
	1 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	20 kelompok	86.668.000	Batam
	2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	30 kelompok	51.740.000	Batam
	II Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memenuhi standar sesuai SOP	330 pembudidaya ikan	2.018.745.000	Batam
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	42.414.000	Batam
	2 Sub Kegiatan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen	66.059.000	Batam
	3 Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	137 unit	1.910.272.000	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
C	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Jumlah Produksi Pengolah Hasil Perikanan	1.356,32 Ton	1.227.523.000	Batam
	I	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil dan mikro yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan	40 Unit Usaha	305.182.000	Batam
	1	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	200 Unit Usaha	305.182.000	Batam
	II	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ikan konsumsi yang disediakan dan disalurkan (ton)	53.889,49 Ton	922.341.000	Batam
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	534 ton	539.038.000	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
	2	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	88 pelaku usaha	383.303.000	Batam
D	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	17.229.515.161	Batam
	I	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	15.598.605.201	Batam
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bulan	15.598.605.201	Batam
	II	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	122.640.000	Batam
	1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	122.640.000	Batam
	III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	586.545.280	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4.500.000	Batam
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	261.338.280	Batam
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Pelayanan Bidang Perikanan)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	16.389.500	Batam
	4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Batam
	5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.116.000	Batam
	6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	293.591.000	Batam
	7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Pelayanan Bidang Perikanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	32.950.000	Batam
	IV	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	301.347.000	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	71 unit	57.679.000	Batam
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	27 unit	228.140.000	Batam
	3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	3 unit	15.528.000	Batam
	V	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	156.711.280	Batam
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	114.970.000	Batam
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	12 laporan	41.741.280	Batam
	VI	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	463.666.400	Batam



NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	12 unit	210.480.000	Batam
	2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	38 unit	26.860.000	Batam
	3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	226.326.400	Batam

BAB V

PENUTUP

Kebijakan pembangunan Kota Batam Urusan Perikanan Tahun 2025 dijabarkan dalam rencana kerja (renja) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025. Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 disusun dengan diawali penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja yang didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bidang Perikanan pada tahun sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2025, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025 mengacu pada identifikasi kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan anggaran program dan kegiatan bidang perikanan yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian penyusunan Rancangan Renja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025. Ketika sudah menjadi Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2025, dokumen ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil perikanan di wilayah Kota Batam. Renja ini masih jauh dari sempurna dan perlu masukan dan saran dari berbagai pihak terkait.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI